

# BAB I

## PENDAHULUAN

### I.1 Latar Belakang

Dunia bisnis yang terus maju dan berkembang pesat telah melahirkan banyak perusahaan yang terus berusaha merajai berbagai segmen pasar di global. Dalam setiap kegiatan bisnis tentunya memiliki risiko masing-masing yang harus dihadapi dalam setiap pengambilan keputusan. Risiko tersebut akan selalu timbul dari berbagai macam celah dalam bisnis yang di jalani dan tidak dapat dihindari. Oleh karena itu setiap perusahaan perlu melakukan antisipasi dalam menghadapi risiko yang akan terjadi dengan tujuan meminimalisir kemungkinan terjadinya dampak negatif yang ditimbulkan dari risiko-risiko tersebut. Keterampilan dalam menyusun strategi dan menentukan langkah yang tepat untuk diambil oleh suatu perusahaan diperlukan untuk dapat terus bertahan dan kuat melawan arus persaingan.

Hal tersebut telah disadari oleh pemerintah dengan menyusun Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/PBI/2009 yang tentang penerapan manajemen risiko yang meliputi risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko kepatuhan, risiko hukum, risiko reputasi, dan risiko strategik di sektor perbankan. Peraturan tersebut disusun berdasarkan kesadaran pemerintah atas exposure risiko yang tinggi dalam perusahaan perbankan dan dapat mempengaruhi perekonomian secara luas. Diharapkan dengan di wajibkannya implementasi *enterprise risk management* dengan baik mampu membantu membangun pengendalian internal dan eksternal yang memadai sehingga mampu melindungi kepentingan seluruh pihak dari kerugian yang mungkin ditimbulkan risiko-risiko yang terjadi dimasa depan. Sejauh ini pemerintah baru mewajibkan perusahaan perbankan saja untuk mengadopsi manajemen risiko, namun perkembangan kesadaran akan pentingnya pengungkapan manajemen risiko dalam mendukung proses tata kelola perusahaan yang baik mendorong sektor lain ikut mengungkapkan *enterprise risk management* atau manajemen risiko di dalam perusahaannya secara sukarela.

Dari beberapa *theoretical framework* yang berkaitan langsung dengan pengungkapan manajemen risiko adalah teori keagenan. Teori ini menyatakan pentingnya informasi risiko untuk mengurangi informasi yang asimetris antara pemilik dengan manajemen (Oliveira, et al., 2011). Penerapan *corporate governance* dibutuhkan perusahaan untuk mengkomunikasikan risiko yang dihadapi, dan praktik yang dilakukan manajemen risiko, untuk kepentingan umum juga untuk kepentingan tata kelola yang baik (Oliveira et al., 2011). Menurut Beasley (2006) menyatakan bahwa pengadopsian manajemen risiko akan lebih baik dilakukan pada perusahaan yang berukuran besar.

Penerapan tata kelola perusahaan yang belum memadai dalam perusahaan besar di sektor perbankan dapat memberikan dampak yang krusial bagi kelangsungan kehidupan perusahaan. Kegagalan tersebut terjadi pada perusahaan perbankan di Indonesia yaitu Bank Mega, dimana pada September 2009 deposito milik PT. Elnusa Tbk sebesar Rp. 111 Milyar berhasil dibobol oleh pihak ketiga yang tidak memiliki hak atas pencairan deposito tersebut. Setelah dilakukan penyidikan, pencairan deposito tersebut berhasil dilaksanakan karena diduga surat perintah pencairan deposito dibubuhkan tanda tangan palsu yang kemudian lolos verifikasi di KCU Jababeka. Dana pencairan deposito tersebut dialirkan ke dua perusahaan yaitu PT. Discovery dan PT. Harvestindo. Kepolisian kemudian menangkap Direktur Keuangan Elnusa, Kepala Cabang Bank Mega Jababeka, serta Komisariss dan Direktur Utama PT. Discovery yang dianggap memiliki andil atas kejadian merugikan tersebut. Kejadian tersebut dapat ditinjau akibat dari kelalaian dan kelemahan sistem pengawasan operasional PT. Bank Mega sendiri, karena dapat mencairkan deposito bernominal besar yang hanya menggunakan surat perintah dengan tanda tangan, verifikasi keaslian tanda tangan juga dapat dinilai masih belum memadai berkaca dari kejadian tersebut.

PT. Bank Mega dapat di golongkan sebagai perusahaan perbankan besar dengan total aset Rp.51 Trilyun pada tahun 2010. Dengan total aset yang besar dapat dikatakan bahwa PT. Bank Mega merupakan perusahaan yang besar, dimana seharusnya pengadopsian manajemen risiko akan lebih baik diterapkan dibandingkan dengan perusahaan dengan ukuran kecil (Beasley, 2006). Seiring dengan besarnya ukuran perusahaan, jangkauan untuk terjadinya peristiwa

merugikan akan semakin luas dan beragam tingkatannya. Selain itu, perusahaan yang besar perlu didukung dengan pengelolaan manajemen risiko yang baik dan efektif guna mengantisipasi terjadinya *agency cost* yang tinggi. Penerapan manajemen risiko perusahaan sendiri memiliki tujuan menciptakan sistem atau mekanisme dalam organisasi sehingga risiko yang bisa merugikan organisasi atau perusahaan bisa diantisipasi dan dikelola untuk tujuan meningkatkan penilaian perusahaan (Jatiningrum & Fauzi, 2015). Namun pada kenyataannya, masih sulit untuk dapat dengan sukses melakukan mitigasi risiko yang datang dari berbagai arah dan celah sehingga kejadian yang merugikan tetap terjadi.

Selain pada Bank Mega, kasus yang serupa dialami oleh banyak Bank lain sepanjang tahun 2009 seperti Bank Mandiri yang mengalami kebobolan sebesar Rp. 200 Miliar, Bank Central Asia Rp. 5 Miliar, Citibank Rp. 15 Miliar, dan BRI Syariah sebesar Rp. 2,4 Miliar. Meskipun kronologis masing-masing kasus berbeda dengan yang dialami Bank Mega, namun kasus tersebut menggambarkan seberapa besar exposure perusahaan perbankan terhadap risiko merugikan yang dihadapi. Implementasi *corporate governance* yang baik dinilai menjadi tonggak penting dalam mengsucceskan penerapan manajemen risiko. Dalam *corporate governance* terdapat setidaknya lima unsur yang dapat menjadi tolak ukur, yaitu komisaris independen, ukuran dewan komisaris, keberadaan *risk management committee*, reputasi auditor, dan konsentrasi kepemilikan (Syifa, 2013). Dalam penelitian kali ini penulis tertarik untuk meneliti salah satu variabel dari *corporate governance* tersebut yaitu ukuran dewan komisaris. Ukuran dewan komisaris yang besar dinilai akan menambah peluang bagi dewan komisaris untuk bertukar pikiran dan pandangan dalam memecahkan masalah dan juga mengurangi pengaruh manajer agar fungsi pengawasan dapat berjalan secara efektif (Jatiningrum & Fauzi, 2012). Dalam laporan tahunan 2010 Bank Mega mengungkapkan bahwa perusahaan memiliki anggota dewan komisaris sebanyak empat orang dan dewan direktur sebanyak tujuh orang. Dewan komisaris sendiri memiliki tugas dalam mengawasi evaluasi dan penilaian risiko yang dilakukan oleh komite-komite dibawah dewan komisaris. Dalam hal ini, dapat diasumsikan bahwa proporsi ukuran dewan komisaris dalam PT. Bank Mega belum sesuai karena jumlah dewan komisaris setidaknya harus lebih besar atau paling tidak

sama dengan jumlah dewan direksi agar fungsi pengawasan dapat dijalankan dengan lebih baik (Putri, 2013). Sehingga hal tersebut dapat menjadi salah satu indikasi terjadinya kerugian akibat kurang memaksimalkan merencanakan mitigasi risiko yang dihadapi.

Penerapan manajemen risiko yang memadai merupakan salah satu komponen yang mendukung perwujudan fungsi pengawasan internal perusahaan yang kemudian akan menghasilkan tata kelola perusahaan yang baik. Kegagalan tata kelola dalam perusahaan yang berukuran besar menekankan pentingnya implementasi manajemen risiko, dimana hal tersebut dapat menjadi salah satu cara pencegahan *fraud* (Desender, 2007). Belajar dari kasus-kasus yang telah terjadi secara global menjadi dorongan untuk didirikannya *Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission* (COSO) pada tahun 2004 sebagai organisasi yang kemudian mengeluarkan standar manajemen risiko untuk perusahaan agar dapat mengadopsi manajemen risiko organisasi.

Beberapa penelitian menemukan adanya hubungan antara ukuran perusahaan terhadap pengungkapan manajemen risiko. Desender (2007) dan Sari (2013) menemukan adanya pengaruh signifikan antara ukuran perusahaan terhadap pengungkapan manajemen risiko. Penelitian tersebut konsisten dengan Wijananti (2013). Dalam penelitiannya Desender menyatakan bahwa terjadi pengaruh signifikan antara ukuran perusahaan terhadap pengungkapan *enterprise risk management*. Hasil penelitian tersebut sejalan dengan penelitian Beasley (2006) yang menyatakan semakin besarnya suatu perusahaan, pengungkapan manajemen risiko akan semakin baik karena cakupan peristiwa yang mengancam bagi entitas akan cenderung berbeda dalam lingkungan, waktu, dan tarafnya. Perusahaan yang besar tentu memiliki kompleksitas bisnis yang rumit dan terdiri dari berbagai segmen, sehingga meningkatkan risiko yang akan dihadapi dalam kegiatan operasinya. Sedangkan Golshan & Rahid (2012) menyatakan ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan manajemen risiko. Hal ini konsisten dengan Marhaeni & Yanto (2015) yang menyatakan tidak berpengaruh signifikan.

Ukuran dewan komisaris juga menjadi salah satu variabel bebas penelitian ini dan masih memiliki hasil yang tidak konsisten. Penelitian lainnya

mengungkapkan tentang pengaruh ukuran dewan komisaris terhadap pengungkapan manajemen risiko adalah Jatiningrum & Fauzi (2012) yang mengungkapkan bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan manajemen risiko. Pengaruh tersebut mengindikasikan bahwa peran pengawasan yang dilakukan dewan komisaris yang besar membantu manajemen dalam memastikan penerapan manajemen risiko yang baik. Jumlah dewan komisaris yang lebih besar akan memberikan kesempatan untuk mengawasi dan membentuk komite dengan keterampilan yang diperlukan seperti membentuk komite manajemen risiko. Dewan komisaris dapat berkoordinasi dan bekerjasama dalam hal pengawasan dan komite manajemen risiko juga akan lebih baik dalam menganalisis masalah yang muncul. Kewajiban dewan komisaris adalah untuk mengawasi penerapan manajemen risiko dan memastikan manajemen memiliki program manajemen yang efektif (Meizaroh & Lucyanda, 2011). Perusahaan yang memiliki dewan komisaris akan memiliki kemampuan yang lebih dalam mengelola risikonya karena dewan komisaris akan melakukan pengawasan yang lebih independen dan meminimalisir pengaruh manajemen dalam mengambil keputusan. Hasil tersebut tidak konsisten dengan yang dinyatakan Meizaroh & Lucyanda (2011) menyatakan bahwa ukuran dewan komisaris tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan manajemen risiko. Menurut penelitian Meizaroh ukuran dewan komisaris yang besar akan memperbesar peluang terjadinya *agency cost* yang terjadi akibat perbedaan pendapat, dan memakan waktu lebih lama dalam mengambil keputusan.

Terkait dari permasalahan yang terjadi dan dijabarkan sebelumnya, penulis merasa tertarik untuk membahas topik mengenai pengungkapan *Enterprise Risk Management* yang mana dalam topik tersebut masih memiliki perbedaan hasil dalam penelitian-penelitian sebelumnya yang meneliti topik sama. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah variabel yang diambil, populasi yang diteliti yaitu sektor perbankan, dan tahun penelitian sampel yaitu 2013-2015. Peneliti memutuskan untuk melakukan penelitian dengan judul 'Pengaruh Ukuran Perusahaan dan Ukuran Dewan Komisaris terhadap Pengungkapan *Enterprise Risk Management*' yang diteliti menggunakan sampel perusahaan perbankan di Indonesia periode tahun 2013-2015.

## I.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

- a. Apakah Ukuran Perusahaan berpengaruh signifikan terhadap Pengungkapan *Enterprise Risk Management*?
- b. Apakah Ukuran Dewan Komisaris berpengaruh signifikan terhadap Pengungkapan *Enterprise Risk Management*?

## I.3 Tujuan Penelitian

- a. Menguji dan menganalisis Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap Pengungkapan *Enterprise Risk Management*.
- b. Menguji dan menganalisis apakah Ukuran Dewan Komisaris berpengaruh terhadap Pengungkapan *Enterprise Risk Management*.

## I.4 Manfaat dari Hasil Penelitian

Harapan penulis dengan hasil penelitian yang dilakukan agar dapat memberikan manfaat teoritis dan praktis terhadap Pengungkapan *Enterprise Risk Management*.

- a. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis yang dapat diberikan kepada para akademisi adalah untuk mengembangkan pengetahuan mengenai variabel-variabel yang saya teliti yaitu Ukuran Perusahaan dan Ukuran Dewan Komisaris terhadap Pengungkapan *Enterprise Risk Management*. Harapan saya hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan literatur akuntansi, serta dapat dijadikan acuan bagi penelitian selanjutnya.

- b. Manfaat Praktis

- 1) Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat menambah pengetahuan bagi peneliti tentang pengaruh Ukuran Perusahaan dan Ukuran Dewan Komisaris terhadap Pengungkapan *Enterprise Risk Management* yang pengukurannya

didasarkan pada atribut laporan tahunan dan laporan keuangan. Selain itu, penelitian ini juga menambah pengalaman bagi peneliti dalam menganalisa dan memecahkan masalah dengan ilmu yang di dapat selama masa perkuliahan.

## 2) Bagi Pihak Sektor Keuangan

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kualitas pengungkapan *Enterprise Risk Management*. Penelitian ini diharapkan membantu pemangku kepentingan dalam perusahaan untuk terus meningkatkan kualitas pengungkapan manajemen risiko, sehingga kualitas pengendalian internal perusahaan dan kualitas tata kelola perusahaan ikut serta meningkat. Dengan pengendalian internal yang baik maka fungsi pengawasan terhadap segala bentuk *fraud* dan risiko yang dihadapi akan meningkat, sehingga memperkecil kesempatan kejadian-kejadian merugikan tersebut terjadi. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat membantu pengendali perusahaan dalam membuat keputusan penanggulangan risiko yang lebih efektif dan efisien.

## 3) Investor

Hasil dari penelitian ini dapat memberikan informasi kepada investor dan masyarakat yang berperan menjadi *stakeholder* perusahaan dalam memberikan penilaian dan pertimbangan terhadap kualitas manajemen risiko perusahaan sehingga dapat menumbuhkan sifat kehati-hatian (*prudence*) dalam menginvestasikan sumber daya.